KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Calon Pimpinan DPR 2019-2024: Semulus Apa Jalan Puan Maharani?
Tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

CALON PIMPINAN DPR 2019-2024

Semulus Apa Jalan Puan Maharani?

Bisnis, JAKARTA — Tak kalah menarik dengan Mahkamah Konstitusi, panggung politik di parlemen periode 2019—2024 bakal mencuri perhatian. Setidaknya, dalam pengisian pos pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

John Andhi Oktaveri
john.andhi@bisnis.com

Satu nama yang paling membetot perhatian adalah Puan Maharani, kader PDIP yang juga putri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Nama Puan mulai disebut-sebut bakal mengisi kursi Ketua DPR. Alasannya, PDIP merupakan partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan peraih suara terbanyak pada perhelatan Pemilihan Calon Anggota Legislatif pada April lalu.

Saat berada di DPR, Puan mengatakan bahwa dirinya siap apabila diberi amanat menjadi Ketua DPR periode 2019—2024.

"Kursi Ketua DPR memang akan menjadi milik PDIP sebagai pemenang pemilu. Sesuai dengan proses pemilu yang lalu juga saya bisa kemudian mendapatkan suara terbanyak nasional," ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (25/6).

Hanya saja Puan tidak mau berspekulasi karena masih harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

> **PDIP merupakan partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan peraih suara terbanyak pada perhelatan Pemilihan Calon Anggota Legislatif pada April lalu.**

"Ya mungkin bisa jadi salah satu calon yang kuat. Baru salah satu calon yang kuat karena keputusannya akan diputuskan oleh Ibu Ketum [Megawati]," kata Puan.

Puan mengaku belum ada pembicaraan di internal partainya terkait dengan penugasan pada posisi tertentu, termasuk untuk posisi ketua DPR. Namun, dirinya sangat siap jika diposisikan sebagai Ketua DPR RI.

"Belum tahu juga masih nunggu September," katanya.

Memang Puan tidak serta merta akan menduduki posisi Ketua DPR setelah dilantik pada awal Oktober 2019.

Merujuk pada Pasal 84 UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Artinya, apabila komposisi pemilihan pimpinan DPR terjadi seperti periode 2014 saat muncul dua paket calon pimpinan DPR, bisa terjadi perubahan angin politik. Pada 2014, paket pimpinan DPR Koalisi Indonesia Hebat kalah suara dari Koalisi Merah Putih.

Hanya saja, saat itu memang kursi parlemen dominan oleh anggota Koalisi Merah Putih. Melihat hasil pemilu 2019, komposisi parlemen bakal kuat dikuasai oleh Koalisi Indonesia Kerja, pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menyatakan bahwa Puan adalah sosok paling berpeluang menjadi Ketua DPR RI.

Basarah mengatakan bahwa Puan berpengalaman di eksekutif sebagai Menteri Koordinator Bidang PMK.

Selanjutnya, pengalaman di legislatif, Puan menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR RI periode 2009—2014 selain sudah tiga periode menjadi pengurus DPP PDIP.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai ke depan tidak akan terlalu banyak gejolak dalam pemilihan posisi pimpinan di parlemen.

Fahri mengungkapkan pentingnya memiliki parlemen yang bisa bersikap kritis terhadap segala kebijakan pemerintah.

Hanya saja, dia melihat belum ada tanda-tanda DPR akan semakin kuat guna menjaga prinsip *check and balances* dalam demokrasi.



Bisnis/Husin Parapat

PIMPINAN MPR

Selain kursi pimpinan DPR, calon pimpinan MPR juga menjadi perhatian.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengusulkan agar posisi ketua MPR nantinya tidak dipilih secara paket, tetapi diberikan kepada partai yang raihan suaranya kecil ata dari partai yang berada di luar koali parpol pemenang pemilu.

Menurutnya, disepakatinya pimpina MPR dari partai kecil bertujuan untu menunjukkan sikap gotong royon karena MPR menjadi simbol peme satu bangsa.

Andreas menegaskan bahwa s bagai Majelis Permusyawarata Rakyat, pemilihan pimpinan MI justru harus menggunakan ca musyawarah dalam menentuka pimpinannya, bukan melalui p milihan seperti di DPR.

Apalagi, ujarnya, pimpinan MI merupakan orang-orang yang d harapkan menjadi negarawan ata mengutamakan politik kenegaraa

"Pimpinn MPR itu merupakan ju bicara negara, bukan juru bicara lemba sehingga politiknya juga politik nega dan dipilih melalui musyawarah," uj Andreas dalam diskusi bertema "U MD3 Perlukah Dipisah?" di Gedur DPR, Selasa (25/6).

Sementara itu, Ketua Badan Legisl si (Baleg) DPR Supratman Andi Agt menyatakan seharusnya fokus perhatia saat ini bukan pada mekanisme pem lihan pimpinan MPR, mengingat h terpenting adalah soal kewenangan da produktivitas lembaga itu.

Dia menilai selama ini kewenanga MPR tidak kuat sebagai lembaga negar

"Lebih baik MPR fokus pada produ dan kewenangan. Jangan MPR hanya ja simbol tapi tak punya kewenangan untu mengambil putusan penting," ujarnya

Sementara itu, terkait pemilihan pimpi an MPR, Supratman mengatakan bahw masih terbuka berbagai kemungkina setelah hasil sengketa pilpres diumun kan Mahkamah Konsitusi (MK) dala beberapa hari ke depan. B